BAB II

TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung.

Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.[1] Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.[2] Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.[3]

Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu

---

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.587.

[2] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

[3] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan[4]. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Peneliti menggunakan teori–teori yang relevan untuk menentukan arah aktivitas penelitian. Teori yang akan digunakan peneliti adalah teori konflik. Teori konflik yang dikembangkan oleh Ralp Dahrendrof, Ralf Dahrendorf, seorang ahli sosiologi lahir pada tanggal 01 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ayahnya Gustav Dahrendorf dan ibunya bernama Lina. Tahun 1947-1952, ia belajar filsafat, psikologi dan sosiologi di Universitas Hamburg, dan tahun 1952 meraih gelar doktor Filsafat. Tahun 1953-1954, Ralf melakukan penelitian di London School of Economic, lalu tahun 1956, ia memperoleh gelar Phd di Universitas London. Tahun 1957-1960 menjadi Professor ilmu sosiologi di Hamburg, tahun 1960-1964 menjadi Professor ilmu sosiologi di Tubingen, selanjutnya tahun 1966-1969 menjadi Professor ilmu sosiologi di Konstanz. Menjadi ketua Deutsche Gesellschaft fur Soziologie (1967-1970),

[4] Pruit&Rubin dalam Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*.(Jakarta:Kencana.2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi anggota Parlemen Jerman di Partai Demokrasi. Tahun 1970, ia menjadi anggota komisi di European Commission di Brussels, dan tahun 1974-1984, menjadi direktur London School of Economics di London.

Kemudian tahun 1984-1986, Ralf menjadi Professor ilmu-ilmu sosial di Universitas Konstanz. Dan tahun 1986-1997 menetap di Inggris dan menjadi warga negara Inggris (1988). Pada tahun 1993, Dahrendorf dianugerahi penghargaan gelar sebagai Baron Dahrendorf oleh Ratu Elizabeth II di Wesminister, London, dan di tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Princes of Asturias Award untuk ilmu-ilmu sosial. ***Class and Class Conflict in Industrial*** Karya-karya Ralf Dahrendorf ***The Modern Social Conflict Society*** (Stanford University Press, 1959) University of California Press: Barkeley dan Los Angeles, 1988) ***Reflection on The Revolution in Europe*** (Random House, New York, 1990).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik Dahrendorf. Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap Teori Fungsionalisme Struktural. Kalau menurut Teori Fungsionalisme structural masyarakat dalam kondisi yang statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritisi konflik melihat pertikaian dan konflik dalam system sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjaga stabilitas. Teoritisi konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritisi konflik melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teoritisi konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.[5]

Masyarakat senantiasa dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsur. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi.[6] Teori konflik memandang masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya

---

[5] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, Jakarta : Prenada Media,2004), 153

[6]George Ritzer, , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. [7]

Dahrendraf adalah pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori consensus. Teoritisi consensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat sementara teoritisi konflik harus menelaah konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Dahrendraf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan consensus, yang merupakan prasyarat bagi masing-masing. Jadi, kita tidak mungkin berkonflik kecuali terjadi consensus sebelumnya. Sebagai contoh ibu rumah tangga di Prancis cenderung tidak berkonflik dengan para pemain catur Chile karena tidak ada kontak antar mereka, tidak ada integrasi sebelumnyayang menjadi dasar bagi adanya konflik. Sebaliknya konflik dapat mengarah pada consensus dan integrasi . contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang yang berkembang setelah Perang Dunia II.

Dahrendraf mengawali pembahasannya dengan, dan banyak dipengaruhi oleh fungsionalisme structural. Ia mencatat bahwa bagi para fungsionalis, sistem sosial disatukan oleh kerja sama, sukarela, consensus

[7]George Ritzer, , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum atau keduanya. Namun bagi teoritisi konflik (atau koersi) masyarakat dipersatukan oleh “kekangan yang dilakukan dengan paksaan”, sehingga beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan dan otoritas atas pihak lain. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendraf pada tesis sentralnya bahwa perbedaab distribusi otoritas “ selalu menjadi factor penentu konflik sosial sistematis”.

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Dia menyebut otoritas tidak terletak dalam individu tapi dalam posisi. Sumber struktur konflik harus dicari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual.

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci adalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-cri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol ditentukan di dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terakhir, karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Saat kekuasaan merupakan tekanan (coersive) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan "authority", dimana beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lang lain.

Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan, kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Butiran yang penting sekali ialah bahwa suatu asosiasi yang harus dikoordinasi adalah setiap organisasi di mana otoritas itu ada (yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi) dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah sangat berbeda dari persons, keduanya melihat hal itu sebagai suatu keharusan walaupun Dahrendraf kelihatannya kurang senang dengan istilah "prasyarat fungsional" keduanya setuju bahwa suatu fungsi dari kekuasaan adalah umtuk mengintegrasi sebuah unit, mendorong pemenuhan yang gagal dilakukan oleh norma-norma dan nilai-nilai. Sementara Persons menekankan aspek integratif yakni kekuasaan dan otoritas menemukan kebutuhan-kebutuhan dari keseluruhan sistem.

Dahrendraf mengatakan hal itu bersifat memisahkan. Alasan untuk itu adalah bahwa hal itu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dan peran yang diharapkan. Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan dan mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Dia mengatakan hal itu merupakan kepentingan objektif, yang terbentuk di dalam peran-peran itu sendiri, bersamaan dengan kepentingan atau fungsi dari semua peran dalam mempertahankan organisasi itu sebagai keseluruhan. Dunia sosial karenanya distruktur ke dalam kelompok-kelompok yang secara potensial mengandung konflik, apa yang Dahrendraf sebut sebagai quasi group.

Hal ini tentu saja sejauh teori berkembang sebagai suatu teori, langkah berikutnya terdari proposisi-proposisi empiris yang bersifat umum tentang kondisi-kondisi yang membuat kelompok-kelompok quasi menjadi kelompok-kelompok konflik. Kondisi-kondisi yang berbeda yang berakibat dalam tipe konflik yang berbeda dan kondisi-kondisi yang menentukan hasil-hasil berikutnya. Karena itu dibandingkan dengan fungsionalisme struktural maka teori Dahrendraf adalah suatu yang dalam tingkat rendah terbagi dalam dua bagian:

1. Suatu proposisi teoritis pokok: bahwa struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Deskripsi-deskripsi umum tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan konflik-konflik.[8]

Konsep sentral dari teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Dalam teori konflik wewenang dan juga kekuasaan merupakan faktor yang menentukan terjadinya konflik sosial. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang seantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai : persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan

[8] Paul S. Baut, T. Effendi, *Teori-Teori Sosial Modern dari Persons sampai Habermas*,(Jakarta : Rajawali, 1986), hlm 93-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata yang bertentangan secara subtansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan yang tertentu selalu dinilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendraf disebut sebagai peranan laten.

Dahrendrof membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok semu (quasi group) atau“ sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama”[9]. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kedua yaitu kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan

[9]Dahrendraf, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004),156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Dimana kedua kelompok ini telah dilukiskan oleh dahrendrof seperti berikut.

Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut oleh kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan dan program dan anggota perorangan. Dari berbagai kelompok itulah muncul kelompok konflik.

Dahrendraf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai pleh pertentangan terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Sebagaimana dikatakan oleh Dahrendraf

“ secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisa bila dilihat sebagai pertentangan mengenai ligitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideology keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideology ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya”

Kepentingan yang dimaksudkan Dahrendraf mungkin bersifat manifest (disadari) atau laten (kepentingan potensial). Kepentingan laten adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Ini adalah "perumusan psikologis" yang sama sekali bukan merupakan sasaran pengkajian sosiologis, kecuali mereka menjadi tujuan-tujuan yang disadari. Jadi orang dapat menjadi anggota suatu kelas yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi sebagai kelompok mungkin mereka tidak menyadari kekurangannya. Hal ini merupakan kasus dari banyak kelompok minoritas di tahun 1960-an kesadarannya telah memuncak, antara lain termasuk kelompok-kelompok kulit hitam, wanita, suku India dan Chicanos. Demikian kepentingan-kepentingan yang tidak disadari atau laten itu tampil kepermukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari (persamaan gaji, persamaan kesempatan kerja), berkembanglah organisasi-organisasi yang disebut Dahrendraf sebagai kelompok-kelompok manifes. Misalnya sebelum tahun 1960-an sebagian besar wanita merupakan kelompok semu yang ditolak kekuasaan di sebagian besar struktur sosial di mana mereka berpartisipasi. Pada pertengahan tahun 1960-an berbagai kepentingan laten kaum wanita itu mulai muncul kepermukaan atau disadari, yang kemudian diikuti oleh perkembangan kelompok yang memperjuangkan kebebasan wanita. Jadi pertentangan antara kaum lelaki yang menduduki kekuasaan dan kaum wanita yang dikuasai diatur atau diredakan lewat organisasi structural.pertentangan yang telah berakar dan potensial diantara kedua jenis ini sekarang diatur lewat institusionalisasi pertentangan yang demikian. Menurut dahrendraf usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mencoba untuk menekan atau menghapuskan pertentangan tersebut adalah sia-sia. Dalam masyarakat modern pertentangan itu harus diatur melalui institusionalisasi demikian kepentingan yang bertentangan itu disadari.[10]

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain : 1. Kelompok Semu (*quasi group*) 2. Kelompok Kepentingan (*manifes*) 3. Kelompok Konflik Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawahi (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan

[10] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: CV Rajawali,1987), hlm135-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, Adanya status sosial didalam masyarakat (sumber konflik yaitu: Adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pegawai rendah, majikan-buruh) kepentingan (buruh dan majikan, antar kelompok,antar partai dan antar Adanya dominasi Adanya ketidakadilan atau diskriminasi. agama). kekuasaan (penguasa dan dikuasai).

Dahrendraf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang merupakan unsure-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik. Di bawah kondisi ideal tidak ada lagi variabel lain yang diperlukan untuk dapat menerangkan sebab-sebab timbulnya konflik sosial. Dalam kondisi yang tidak ideal memang masih ada beberapa factor yang dapat berpengaruh dalam proses terjadinya konflik sosial. Di antaranya kondisi teknik dengan personal yang cukup, kondisi politik dengan suhu yang normal, kondisi sosial dengan adanya rantai komunikasi. Factor lain menyangkut cara pembentukan kelompok semu. Kalau pembentukannya cukup acak serta benar-benar ditentukan oleh kesempatan maka konflik kelompok tidak akan muncul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian beda dengan pandangan Marx, Dahrendraf tidak merasa bahwa lumpen ploretariat akan menjadi kelompok konflik kalau orang yang menjadi anggotanya terbentuk secara kebetulan. Malah sebaliknya kelompok semu yang pembentukannya ditentukan secara structural memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan yang merupakan sumber pertentangan itu.[11]

Aspek terakhir dari teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendrof menganggap konflik adalah satu bagian dari realitas sosial, yang mana konflik tersebut juga bisa menyebabkan perubahan dan juga perkembangan. Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Dahrendrof juga mengatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul dan kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal.

---

[11] George Ritzer, , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila konflik disertai tindakan kekerasan akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba[12].

Peneliti menggunakan teori konflik untuk menganalisis tentang polarisasi penduduk lokal dalam pembangunan di desa Pangklungan dusun Mendiro kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang. Karena teori ini di anggap relevan dengan judul tersebut dimana dalam suatu masyarakat itu selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi secara terus menerus. kekuasaan dan juga wewenang dapat merubahan posisi atau struktur yang telah ada. Dari wewenang dan kekuasaan tersebut yang tidak berjalan dengan seimbang yang senantiasa membawa individu pada posisi atas dan posisi bawah yang akan menimbulkan dua golongan yang saling bertentangan yang mana golongan yang berkuasa ingin mempertahankan status quo sedangkan yang dikuasai ingin selalu mengalami perubahan. Dahrendraf membedakan golongan tersebut menjadi dua golongan yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan.

Polarisasi yang terjadi di desa Panglungan ini dimana kekuasaan dan wewenang tidak berjalan dengan seimbang yang akhirnya menimbulkan dua golongan atau kelompok pertama yaitu kelompok Kepuh dan kelompok

[12] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, Jakarta : Prenada Media,2004), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemuda. Dimana kelompok-kelompok ini saling bertentangan dalam masalah pembangunan terutama dalam pembangunan pariwisata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id